



Bab II

Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran

Seperti telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepemilikan non-pemerintah terhadap biaya keagenan. Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori dasar yang dapat dijelaskan dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut.

Landasan teori dijelaskan sebagai sub bab pertama berisikan teori-teori dasar yang mendukung dan dapat menjelaskan permasalahan penelitian tersebut. Penelitian Terdahulu sebagai sub bab kedua dimana sub bab tersebut menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Selain itu, sub bab terakhir akan menjelaskan kerangka berpikir yang mendasari hipotesis penelitian dan bagaimana model penelitian ini akan dibangun.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling dalam Hapsari (2011) menggambarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dengan agen.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain



(agent) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989).

Permasalahan-permasalahan dalam hubungan keagenan sebagai berikut:

a. Masalah keagenan yang timbul pada saat:

- 1) Keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan
 - 2) Merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen
- Permasalahannya adalah bahwa *principal* tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat.

b. Masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko

Permasalahannya adalah bahwa prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan dimana *principal* mendelegasikan pekerjaan kepada agen.

2. Masalah Keagenan

Jensen dan Meckling dalam Destriana (2011) mengemukakan bahwa pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). *Agency problem* yang dimaksud

antara lain adalah terjadinya informasi yang asimetri (tidak sama) antara yang dimiliki oleh pemilik dan pengelola. Dengan adanya kepemilikan informasi yang tidak setara itu maka manajemen (agen) perusahaan cenderung melakukan *moral hazard* dan *adverse selection*. Manajer memang mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan.

Masalah keagenan adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan (Gitman dan Zutter, 2015:68). Masalah keagenan dapat diatasi atau diminimalisasi dengan dua cara yaitu: (1) *Market Forces*. *Market forces* merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional. Investor institusional mempunyai hak suara mayoritas, diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara member tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik atau mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan *takeover* yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuannya adalah untuk memotivasi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. (2) *Agency Cost*. *Agency cost* merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Biaya Keagenan

Biaya keagenan menurut jenis biayanya dapat dikelompokkan menjadi tiga: Pertama, biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh prinsipal: biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan/ kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, dan biaya terkait ekuitas pihak luar. Kedua, biaya pengikatan (*bounding cost*) oleh agen: manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang (*pecuniary*) dan tidak terkait uang (*non pecuniary*), biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait covenant dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Ketiga, kerugian residual (*residual loss*) yang mungkin ada: risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan.

4. Struktur Kepemilikan

Perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh satu pemilik dan juga berperan sebagai manajer maka perusahaan tidak memiliki biaya keagenan atau *zero agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Biaya keagenan baru timbul ketika kepemilikan perusahaan terbagi-bagi.

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik (Xu dalam Fadli, 2015).

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk memengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Masalah keagenan dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal dalam Septiawan dan Wirawati, 2016).

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pada teori penyatuan strategik berpandangan bahwa pemegang saham besar lebih efektif dalam melakukan kerjasama dengan manajemen dalam banyak hal. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur tentang transparansi dan proses kepemilikan saham 5% atau lebih. Hal ini mencerminkan batasan 5% sudah dianggap signifikan di Bursa Efek Indonesia (Hadiprajitno, 2013).

Pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung memengaruhi struktur dewan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Pemerintah yang menanamkan uang negara dalam perusahaan lazimnya sesuai dengan tujuan/ kebijakan bidang politik, sosial, ekonomi, maupun lainnya (Shleifer dan La Porta, dkk dalam Hadiprajitno, 2013). Pada perusahaan kepemilikan pemerintah lebih tidak efisien dibanding yang bukan dimiliki pemerintah (Shleifer dan Vishny dalam Hadiprajitno, 2013). Kepentingan politik dapat sangat berpengaruh bagi pencapaian kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh non pemerintah dimana kepemilikan non pemerintah ini terdiri dari swasta domestik dan asing.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Paulus Basuki Hadiprajitno (2013)

Hadiprajitno melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap biaya agensi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 – 2009. Variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance*. Variabel dependen yang digunakan adalah biaya agensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan institusi, struktur kepemilikan pemerintah, dan struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan, sedangkan proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya agensi yang diprosikan dengan *total asset turnover*.



2. Humosor Panuju, Makhdalena, Sumarno (2013)

Humosor Panuju, Makhdalena, dan Sumarno melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah terhadap *agency cost* pada perusahaan yang listing di BEI tahun 2008-2013. Variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah. Variabel dependen yang digunakan adalah *agency cost*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan struktur kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *agency cost*.

3. Yonatan Kurnia Wijaya (2014)

Yonatan Kurnia Wijaya melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan, dan *Debt to Total Asset*, dengan umur perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap biaya agensi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah biaya agensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya agensi, struktur kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap biaya agensi, struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap biaya agensi dari rasio *debt to total asset* tidak berpengaruh terhadap biaya agensi, dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya agensi dari rasio *debt to total asset*.

4. I Kadek Hery Septiawan dan Ni Gst Putu Wirawati (2016)

I Kadek Hery Septiawan dan Ni Gst Putu Wirawati melakukan penelitian pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan kebijakan utang pada kos keagenan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam tahun pengamatan 2012-2014. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



asing, ukuran perusahaan, dan kebijakan utang. Variabel dependen yang digunakan adalah kos keagenan. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap kos keagenan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kos keagenan, serta kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kos keagenan.

5 Rafika Pratiwi dan Arief Yulianto (2016)

Rafika Pratiwi dan Arief Yulianto melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan komisaris independen terhadap biaya keagenan pada perusahaan yang masuk dalam *Indonesia Most Trusted Companies*. Variabel dependen yang digunakan adalah biaya agensi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya keagenan.

C. Kerangka Pemikiran

Kepemilikan Non Pemerintah dan Biaya Keagenan

Tindakan pemantauan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional domestik dapat membatasi perilaku para manajer. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku *opportunistic* yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan, yang berarti semakin besar tingkat kepemilikan investor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



institusional dalam suatu bank dapat meningkatkan kinerja keuangan pada bank tersebut sehingga akan mengurangi biaya keagenan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Septiawan dan Wirawati (2016) menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan. Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di investasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan. Sesuai dengan teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi turun adalah hubungan yang tidak baik antara pemegang saham dengan manajer tetapi ketika hubungan antara pemegang saham dengan manajer bisa dikendalikan maka kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik. Semakin tinggi kepemilikan asing, maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi, dengan demikian keselarasan antara tujuan ingin memaksimalkan kinerja perusahaan akan tercapai karena persamaan prinsip antara pemegang saham asing dengan manajemen yang juga ditempati pihak asing sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Perusahaan yang memiliki investor asing dianggap memiliki kinerja yang lebih baik. Investor asing juga lebih pintar dalam melakukan investasi. Menurut Porta et al. (1999) karena investor asing menghadapi risiko yang besar dalam melakukan investasi lintas negara terutama pada negara berkembang menyebabkan *monitoring* yang dilakukan oleh investor asing relatif lebih tinggi. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas. Adanya

Ⓒ keterbukaan informasi dapat mengurangi kos keagenan yang terjadi di perusahaan (Xiao et al. dalam Rahamdiyani, 2012).

H : Kepemilikan non-pemerintah berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan

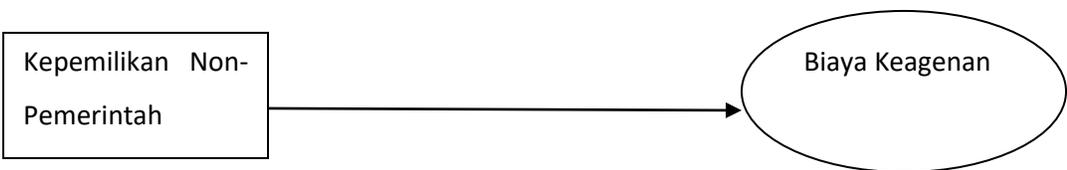
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis yang diajukan

H₁: Kepemilikan non-pemerintah berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

